

RINGKASAN DISERTASI

PENDIDIKAN ISLAM MULTIKULTURAL DI PESANTREN: Telaah terhadap Kurikulum Pondok Pesantren Modern Islam Assalaam Surakarta Tahun 2006/2007



Oleh:
Abdullah
NIM: 02.3.319

Promotor:
Prof. Dr. H. Sugiyono
Prof. Dr. H. Abdurrahman Mas'ud, MA

PROGRAM PASCASARJANA
UIN SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2009

PUSHTAKAAN UIN SUNAN KALIJAGA		
Nomor :	50	/RD /Th: 09
Tanggal :	-- MAR 2009	

TIM PENGUJI

Prof. Dr. H.M. Amin Abdullah
(Ketua Sidang)

Dr. H. Sukamta, M.A.
(Sekretaris Sidang)

Prof. Dr. H. Sugiyono
(Promotor/Anggota Penguji)

Prof. Dr. H. Abdurrahman Mas'ud, MA
(Promotor/Anggota Penguji)

Prof. Dr. Anik Ghufro
(Anggota Penguji)

Dr. Sekar Ayu Aryani, M.A.
(Anggota Penguji)

Prof. Dr. H.M. Bahri Ghozali, M.A.
(Anggota Penguji)

Dr. Ratno Lukito, M.A.
(Anggota Penguji)

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengungkap perencanaan kurikulum Pondok Pesantren Modern Islam Assalaam (PPMI) Surakarta dan nilai-nilai multikultural yang terkandung di dalamnya; (2) mengungkap implementasi kurikulum PPMI Assalaam dan nilai-nilai multikultural yang terkandung di dalamnya; (3) mengungkap evaluasi kurikulum PPMI Assalaam dan nilai-nilai multikultural yang terkandung di dalamnya; serta (4) menemukan model pengembangan kurikulum pesantren multikultural.

Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian di PPMI Assalaam Surakarta, dengan subyek dan informan penelitiannya adalah unsur yayasan, direktur pondok, kepala sekolah MTs, MA, SMA, dan SMK; para guru, para santri, dan beberapa alumni. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik pengamatan terlibat, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Data yang terkumpul selanjutnya dianalisis dengan teknik deskriptif-interpretatif dan analisis isi. Keabsahan data diuji dengan empat cara: perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan peneliti, triangulasi, dan pemeriksaan teman sejawat.

Penelitian ini menghasilkan 4 temuan. *Pertama*, perencanaan kurikulum PPMI Assalaam dilakukan dengan dua tahap: penyusunan draf dan pembahasan. Penyusunan draf perencanaan dilakukan dalam diskusi kelompok, sedangkan pembahasan draf dilakukan dalam workshop. Hasil dari perencanaan kurikulum adalah dokumen kurikulum yang terdiri atas: program pendidikan, kalender akademik, silabus, dan rencana pembelajaran. Dalam perspektif multikultural, perencanaan kurikulum PPMI Assalaam memuat nilai-nilai multikultural—yaitu nilai demokrasi dan nilai keadilan—dan nilai-nilai anti multikultural sekaligus—nilai diskriminasi dan nilai ketidakadilan.

Kedua, implementasi kurikulum PPMI Assalaam menggunakan model kurikulum berbasis kompetensi (KBK) dengan menekankan pada pencapaian kompetensi peserta didik dalam berpikir dan berperilaku. Dalam implementasi kurikulum ditemukan nilai-nilai multikultural dan nilai-nilai anti multikultural sekaligus. Nilai demokrasi, nilai solidaritas dan kebersamaan, nilai kasih sayang dan memaafkan, serta nilai perdamaian dan toleransi terdapat dalam materi ajar, kegiatan pembelajaran, dan evaluasi pembelajaran. Adapun nilai diskriminasi dan ketidakadilan terdapat dalam penggunaan variasi sumber belajar yang hanya diperuntukkan bagi program layanan khusus dan bukan pada kelas reguler.

Ketiga, evaluasi kurikulum PPMI Assalaam dilakukan pada setiap akhir semester, dengan menekankan pada aspek implementasi kurikulum, baik untuk implementasi kurikulum pondok maupun implementasi kurikulum sekolah/madrasah. Dalam evaluasi kurikulum tersebut terkandung nilai-nilai multikultural: nilai demokrasi, perdamaian, toleransi, dan kebersamaan terutama dalam proses dan produk evaluasi kurikulum. Sementara itu, nilai konflik, hegemoni, dan dominasi terdapat dalam interaksi antar santri di lingkungan pesantren sehari-hari.

Keempat, model kurikulum pesantren multikultural harus mempertimbangkan tiga hal: (1) perencanaan kurikulum pesantren multikultural ditentukan oleh proses dan produknya. Proses perencanaannya melibatkan partisipasi banyak pihak yang ada di pesantren secara demokratis, adil, dan terbuka. Produknya berupa dokumen kurikulum yang memuat nilai-nilai multikultural; (2) implementasi kurikulum pesantren multikultural ditentukan oleh buku ajar yang memuat nilai-nilai multikultural; strategi pembelajaran yang mengaktifkan para peserta didik berpartisipasi dalam pembelajaran secara demokratis dan menyenangkan; serta evaluasi hasil pembelajaran yang kontekstual dan komprehensif yang meliputi tes lisan, tes tertulis, portofolio, unjuk kerja, dan penugasan; serta (3) evaluasi kurikulum pesantren multikultural ditentukan oleh proses dan produknya. Proses evaluasinya melibatkan partisipasi banyak pihak yang ada di pesantren secara demokratis, adil, dan terbuka. Produknya berupa keputusan tentang perlunya perbaikan terhadap aspek perencanaan dan implementasi kurikulum yang belum memuat nilai-nilai multikultural.

**PENDIDIKAN ISLAM MULTIKULTURAL DI PESANTREN:
Telaah terhadap Kurikulum Pondok Pesantren Modern Islam Assalaam
Surakarta Tahun 2006/2007**

Latar Belakang Masalah

Pentingnya pendidikan multikultural di Indonesia diwacanakan oleh para pakar pendidikan sejak tahun 2000 melalui simposium, workshop, serta berbagai tulisan di media massa dan buku. H.A.R Tilaar, Zamroni, Azyumardi Azra, Musa Asy'ari, Abdul Munir Mul Khan, M. Amin Abdullah, dan Abdurrahman Mas'ud adalah di antara pakar pendidikan Indonesia yang mewacanakan pentingnya pendidikan multikultural di Indonesia. Wacana pentingnya pendidikan multikultural di Indonesia pada umumnya didasarkan pada dua alasan berikut.

Pertama, bahwa Indonesia merupakan negara yang memiliki banyak problem tentang eksistensi sosial, etnik dan kelompok keagamaan yang beragam. Problem tersebut disebabkan oleh adanya pengelolaan yang kurang baik terhadap keberadaan multi etnik, multi budaya, dan multi agama yang ada di Indonesia (Asy'arie, 2004: 5). Indikatornya terlihat pada upaya penyeragaman dalam berbagai aspek kehidupan yang dilakukan oleh Pemerintah pada masa Orde Baru. Selama Orde Baru berkuasa, Pemerintah mengabaikan terhadap perbedaan yang ada, baik dari segi suku, bahasa, agama, maupun budayanya. Semboyan "Bhinneka Tunggal Ika" pun diterapkan secara berat sebelah (Azra, 2002: 2).

Kedua, adanya penekanan semangat ke-ika-an dari pada semangat ke-bhinneka-an dalam praktik pendidikan di Indonesia. Beberapa indikatornya sebagai berikut: (1) terjadinya penyeragaman kurikulum dan metode pembelajaran; (2) terjadi sentralisasi dalam pengelolaan pendidikan, yang sarat dengan instruksi, petunjuk, dan pengarahan dari atas; (3) belum adanya proses menghargai dan mengakomodasi perbedaan latar belakang peserta didik yang menyangkut budaya, etnik, bahasa, dan agama; (4) proses pendidikan dan pengajaran agama pada umumnya lebih menekankan sisi keselamatan individu dan kelompoknya sendiri daripada keselamatan orang lain di luar diri dan kelompoknya sendiri; (5) terbatasnya ruang perbedaan pendapat antara guru dengan peserta didik, dan atau antara peserta didik satu dengan peserta didik lainnya; (6) fokus pendidikannya hanya pada pencapaian kemampuan ritual dan keyakinan tauhid; (7) guru lebih sering menasihati peserta didik dengan cara

mengancam; (8) guru hanya mengejar standar nilai akademik sehingga kurang memperhatikan budi pekerti dan moralitas anak, serta (9) kecerdasan intelektual peserta didik tidak diimbangi dengan kepekaan sosial dan ketajaman spiritualitas beragama (Zamroni, 2001: 10-12; Abdullah, 2001: 14; Mul Khan, 2001: 17-18; Mass'ud, 2004: 87-88).

Kondisi pendidikan di Indonesia, termasuk pendidikan Islamnya, tidak memadai lagi untuk masyarakat Indonesia yang plural dan multikultural. Oleh karena itu, perlu dilakukan transformasi paradigma pendidikan di Indonesia. Adapun paradigma pendidikan yang ditawarkan adalah paradigma pendidikan multikultural sebagai pengganti paradigma pendidikan yang monokultural.

Tawaran tentang pentingnya pendidikan multikultural ini dalam batas tertentu mendapat respon yang positif dari pihak eksekutif dan legislatif. Hal ini terbukti dengan diundangkannya Undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang mengakomodasi nilai-nilai hak asasi manusia dan semangat multikultural (Bab III, pasal 4, ayat 1). Bahkan nilai-nilai tersebut dijadikan sebagai salah satu prinsip penyelenggaraan Pendidikan Nasional, sebagaimana yang termaktub pada Bab III pasal 4, ayat 1: "Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa."

Mengingat penyelenggaraan pendidikan memerlukan kurikulum, maka nilai-nilai multikultural tersebut harus dijadikan dasar dalam perencanaan, implementasi, dan evaluasi kurikulum suatu lembaga pendidikan—baik dalam bentuk sekolah, madrasah, maupun pesantren. Pernyataan ini, sejalan dengan prinsip dalam pengembangan kurikulum KTSP (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan). Dari 7 (tujuh) prinsip yang ada, prinsip pengembangan kurikulum yang kedua bermuatan nilai-nilai multikultural. Prinsip yang dimaksud adalah "beragam dan terpadu." Prinsip ini dijelaskan sebagai berikut:

"Kurikulum dikembangkan dengan memperhatikan keragaman karakteristik peserta didik, kondisi daerah, jenjang dan jenis pendidikan, serta menghargai dan tidak diskriminatif terhadap perbedaan agama, suku, budaya, adat istiadat, status sosial ekonomi, dan gender. Kurikulum meliputi substansi komponen muatan wajib kurikulum, muatan lokal, dan pengembangan diri secara terpadu, serta disusun dalam keterkaitan dan kesinambungan yang bermakna dan tepat antar substansi" (Puskur Diknas, 2006: 4).

Namun demikian, prinsip pengembangan kurikulum yang bermuatan multikultural tersebut tidak perlu dijabarkan secara eksplisit dalam Standar Nasional Pendidikan (SNP, PP No. 19 Tahun 2005), yang terdiri atas 8 (delapan) standar, yaitu: (1) standar isi, (2) standar proses, (3) standar kompetensi lulusan, (4) standar pendidik dan tenaga kependidikan, (5) standar sarana dan prasarana, (6) standar pengelolaan, (7) standar pembiayaan, dan (8) standar penilaian pendidikan. Agaknya, penjabaran secara detail dan eksplisit tentang nilai-nilai multikultural diserahkan kepada para pengelola pendidikan—baik di sekolah, madrasah, maupun di pesantren sesuai dengan karakter kurikulum KTSP. Adapun karakter utama dari KTSP adalah bahwa kurikulum disusun dan diimplementasikan oleh masing-masing satuan pendidikan.

Pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam di Indonesia yang pada umumnya menyelenggarakan berbagai satuan pendidikan—baik dalam bentuk sekolah maupun madrasah—juga seyogyanya menjadikan prinsip pengembangan kurikulum yang bermuatan nilai-nilai multikultural tersebut dalam kegiatan perencanaan, implementasi, dan evaluasi kurikulumnya. Namun dalam praktiknya, butir ini tidak mudah dilakukan oleh pesantren, terutama pesantren tradisional (*salafiyah*). Bagi pesantren tradisional, kegiatan perencanaan, implementasi, dan evaluasi kurikulum merupakan kegiatan yang belum populer di kalangan pengelola pesantren. Kegiatan pendidikan di pesantren tradisional pada umumnya merupakan hasil improvisasi dari seorang kyai secara intuitif yang disesuaikan dengan perkembangan pesantrennya. Dengan demikian, pengembangan kurikulum pesantren tradisional sangat ditentukan oleh seorang kyai, sehingga nilai-nilai multikultural—terutama nilai demokrasi dan keadilan—agak tidak ditemukan dalam pengembangan kurikulum pesantren tradisional.

Sementara itu, pesantren modern (*khalafiyah*) dalam batas tertentu telah melakukan kegiatan pendidikannya berdasarkan program yang telah direncanakan oleh seorang kyai dan para pembantunya. Implementasi program pendidikan yang dilakukan juga dievaluasi demi perbaikan di masa yang akan datang. Dengan demikian, pengembangan kurikulum pesantren modern ditentukan oleh kyai dan para ustadz yang ada di pesantren tersebut, sehingga prinsip multikultural diasumsikan ada dalam pengembangan kurikulum pesantren modern. Itulah sebabnya, penelitian ini mengambil fokus pada model kurikulum pesantren modern, yang terdiri atas perencanaan, implementasi, dan evaluasi kurikulumnya.

Sebagai salah satu pesantren modern di Indonesia, Pondok Pesantren Modern Islam Assalaam (dalam uraian selanjutnya digunakan PPMI Assalaam) Surakarta selanjutnya dipilih sebagai obyek dalam penelitian ini. Alasan pemilihan PPMI Assalaam Surakarta sebagai obyek penelitian ini didasarkan pada suatu fakta bahwa PPMI Assalaam Surakarta telah memasukkan nilai-nilai multikultural dalam pengembangan kurikulum—baik dalam aspek perencanaan, implementasi, maupun dalam evaluasi kurikulumnya. Salah satu fakta yang dimaksud adalah adanya keterlibatan banyak pihak dalam pengembangan kurikulum PPMI Assalaam Surakarta. Keterlibatan banyak pihak ini memungkinkan adanya muatan nilai-nilai multikultural dalam perencanaan kurikulum PPMI Assalaam Surakarta.

Selain itu, PPMI Assalaam Surakarta memiliki prinsip “berdiri di atas semua golongan dan tidak memihak kepada golongan tertentu”. Prinsip ini dimaksudkan untuk menghindari adanya sikap *taqlid*, fanatisme golongan, dan konflik antar golongan. Prinsip di atas didukung oleh nama yang digunakan oleh para pendiri untuk menyebut pesantren modern ini, yaitu “*al-salam*”, yang berarti damai. Dalam arti ini, PPMI Assalaam dijadikan sebagai lembaga pendidikan Islam yang akan selalu mengembangkan sikap damai terhadap lingkungannya—terutama pemerintah, sesama umat Islam, masyarakat umum, dan pemeluk agama lain (MT Arifin & Asrowi: 1994: 32). Sikap damai yang dikembangkan oleh PPMI Assalaam di atas menunjukkan bahwa pesantren ini telah memasukkan nilai-nilai multikultural dalam pengembangan kurikulumnya.

Perhatian terhadap nilai-nilai multikultural tersebut diasumsikan terkait dengan fakta bahwa pesantren ini memiliki ribuan santri dengan latar belakang daerah yang sangat beragam. Jika keragaman latar belakang daerah asal santri tersebut tidak dikelola dengan memperhatikan nilai-nilai multikultural, maka sangat potensial akan terjadi konflik di dalamnya. Adapun yang belajar di pesantren ini adalah para santri yang berasal dari 33 propinsi di Indonesia, bahkan ada sejumlah santri yang berasal dari luar negeri, yaitu Brunei, Singapura, dan Qatar. Pada tahun ajaran 2006/2007, PPMI Assalaam memiliki 2.198 santri, yang tersebar di 4 unit pendidikan yaitu: Madrasah Tsanawiyah (MTs), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Atas (SMA), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).

Rumusan Masalah

Dengan mempertimbangkan latar belakang masalah di atas, penelitian ini secara khusus ingin menjawab permasalahan utama: "Bagaimanakah kurikulum PPMI Assalaam Surakarta jika dilihat dari perspektif multikultural, baik dari aspek dasar pengembangan maupun tahapan-tahapannya?" Permasalahan utama ini dirinci sebagai berikut: (1) Bagaimanakah perencanaan kurikulum PPMI Assalaam Surakarta dan nilai-nilai multikultural apa yang terdapat dalam perencanaan kurikulum tersebut? (2) Bagaimanakah implementasi kurikulum PPMI Assalaam Surakarta dan nilai-nilai multikultural apa yang terdapat dalam implementasi kurikulum tersebut? (3) Bagaimanakah evaluasi kurikulum PPMI Assalaam Surakarta dan nilai-nilai multikultural apa yang terdapat dalam evaluasi kurikulum tersebut? (4) Bagaimanakah model pengembangan kurikulum pesantren multikultural?

Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan utama penelitian ini adalah: (1) Mengungkap perencanaan kurikulum PPMI Assalaam Surakarta dan nilai-nilai multikultural yang terkandung di dalamnya. (2) Mengungkap implementasi kurikulum PPMI Assalaam Surakarta dan nilai-nilai multikultural yang terkandung di dalamnya. (3) Mengungkap evaluasi kurikulum PPMI Assalaam Surakarta dan nilai-nilai multikultural yang terkandung di dalamnya. (4) Menemukan model pengembangan kurikulum pesantren multikultural.

Secara teoritik hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menambah khazanah pengetahuan tentang model kurikulum pesantren multikultural yang memuat nilai-nilai multikultural baik dalam aspek perencanaan, implementasi, maupun evaluasinya. Model kurikulum pesantren multikultural sangat diperlukan sebagai salah satu instrumen untuk memecahkan problem tentang eksistensi sosial, etnik dan kelompok keagamaan yang beragam di Indoneisa.

Adapun secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan atau masukan bagi ketua dan anggota Yayasan Majelis Pengajian Islam, dewan kyai PPMI Assalaam Surakarta, para kepala sekolah/madrasah dan para guru di lingkungan PPMI Assalaam Surakarta, serta para pengelola pesantren pada umumnya, untuk mengembangkan kurikulum pendidikan multikultural yang dapat mewujudkan generasi

penerus Indonesia yang saling memahami dan bekerjasama, meski dengan latar belakang etnik, bahasa, budaya, dan agama yang berbeda-beda.

Metode Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di PPMI Assalaam di Surakarta, dengan subyek dan informan penelitiannya adalah unsur yayasan, direktur pondok, para kepala unit pendidikan seperti MTs, MA, SMA, dan SMK; para guru, para santri, dan beberapa alumni. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif dan analisis isi. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik pengamatan terlibat (*participant observation*), wawancara mendalam (*in-dept interview*), dan dokumentasi. Pengamatan terlibat digunakan untuk memperoleh data yang terkait dengan kegiatan perencanaan, implementasi, dan evaluasi kurikulum. Wawancara mendalam digunakan untuk memperoleh data yang terkait dengan sejarah pesantren dan perkembangannya, serta dasar pengembangan kurikulum pesantren, perencanaan, implementasi, dan evaluasinya. Dokumentasi digunakan untuk memperoleh data yang terkait dengan sejarah Assalaam dan perkembangannya, dokumen perencanaan kurikulum, data santri dan guru, buku ajar, dan perangkat kegiatan belajar mengajar yang disusun oleh para guru. Data yang terkumpul selanjutnya dianalisis dengan teknik deskriptif-interpretatif dan analisis isi. Keabsahan data diuji dengan empat cara: perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan peneliti, triangulasi, dan pemeriksaan teman sejawat.

Temuan Penelitian dan Tawaran Model

Pertama, perencanaan kurikulum PPMI Assalaam dilakukan dengan dua tahap: penyusunan draf dan pembahasan. Penyusunan draf perencanaan dilakukan dalam diskusi kelompok, sedangkan pembahasan draf dilakukan dalam workshop. Dari segi prosesnya, dua nilai multikultural—nilai demokrasi dan nilai keadilan—ditemukan dalam perencanaan kurikulum, terutama dalam diskusi kelompok dan workshop. Dalam kegiatan ini, setiap peserta memiliki hak yang sama dalam berpendapat sehingga tercipta suasana yang demokratis, adil, dan terbuka. Hasil dari perencanaan kurikulum adalah dokumen kurikulum yang terdiri atas: program pendidikan, struktur kurikulum, kalender akademik, silabus, dan rencana pembelajaran.

Berdasarkan analisis ditemukan bahwa dokumen kurikulum tersebut memuat nilai-nilai multikultural dan nilai antimultikultural sekaligus. Dua nilai multikultural—nilai kesamaan dan keadilan—terdapat dalam produk perencanaan kurikulum PPMI Assalaam, terutama dalam program pendidikan. Hal ini dapat dilihat dari keputusan bahwa PPMI Assalaam memberikan peluang yang sama dan adil kepada semua santri untuk memperoleh pelayanan pendidikan—seperti kelas unggulan, internasional, akselerasi, dan olimpiade—sesuai dengan tingkat kemampuan intelektual mereka, tanpa membedakan asal usul daerah mereka. Namun demikian, dalam produk perencanaan kurikulumnya sekaligus ditemukan nilai antimultikultural yaitu: nilai diskriminasi dan nilai ketidakadilan. Hal ini dapat dilihat dari sarana pendukung pendidikan, terutama keberadaan kamar asrama eksklusif baik untuk santri putra maupun santri putri. Dikatakan eksklusif, karena kamar asrama tersebut hanya berisi 4 dan 3 santri dengan fasilitas yang eksklusif juga: ranjang, almari, dan kamar mandi di dalam kamar. Untuk memperoleh kamar eksklusif tersebut, santri harus mau menambah sejumlah biaya tambahan. Dengan demikian, hanya santri yang berekonomi kuat yang mampu menempati kamar eksklusif tersebut.

Kedua, implementasi kurikulum PPMI Assalaam menggunakan model kurikulum berbasis kompetensi (KBK) dengan menekankan pada pencapaian kompetensi peserta didik dalam berpikir dan berperilaku. Hal ini dapat dilihat dari rumusan kompetensi dan evaluasi pembelajaran yang dilakukan oleh para guru.

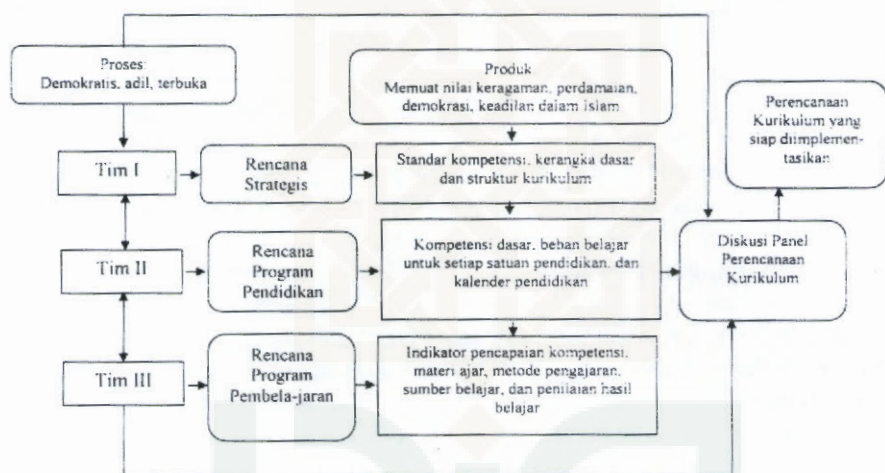
Berdasarkan analisis ditemukan bahwa implementasi kurikulum PPMI Assalaam telah memuat nilai-nilai multikultural dan nilai-nilai antimultikultural sekaligus. Nilai-nilai multikultural, antara lain, terdapat dalam buku ajar yang digunakan di PPMI Assalaam, yaitu: nilai demokrasi, nilai solidaritas dan kebersamaan, nilai kasih sayang dan memaafkan, serta nilai perdamaian dan toleransi. Namun demikian, pada topik *Adab al-Ukhuwwah al-Islāmiyah* tampak jelas bahwa persaudaraan yang dimaksud hanya terbatas pada persaudaraan sesama umat Islam. Untuk umat non-Islam tidak diperlukan persaudaraan, melainkan hanya diperlukan persatuan dan kasih sayang. Nilai multikultural lain—seperti nilai demokrasi dan nilai keragaman—juga ditemukan dalam kegiatan pembelajaran. Hal ini terlihat dari keragaman tempat pembelajaran, metode pembelajaran, dan interaksi yang demokratis antara guru dan siswa, baik dalam pemilihan tempat pembelajaran maupun dalam pembentukan

kelompok, pengajuan pertanyaan, dan pelibatan peserta didik dalam proses pembelajaran. Selain itu, nilai keragaman juga terdapat dalam penggunaan evaluasi pembelajaran. Dari pelaksanaannya, ada empat jenis evaluasi pembelajaran, yaitu: ulangan umum mid semester, ulangan umum semester, ulangan harian, dan ulangan blok. Dari jenis evaluasinya juga beragam, yaitu: tes lisan, tes tulis, tes tugas, tes lembar kerja, tes lembar pengamatan, dan tes unjuk kerja. Adapun nilai anti multikultural yang terdapat dalam implelementasi kurikulum adalah nilai diskriminasi dan ketidakadilan. Hal ini teramati dari penggunaan variasi sumber belajar yang hanya diperuntukkan bagi program layanan khusus, seperti kelas akselerasi, kelas internasional, dan kelas olimpiade. Sementara itu, kelas reguler selama ini hanya menggunakan sumber belajar berupa buku ajar dan guru sendiri.

Ketiga, evaluasi kurikulum PPMI Assalaam dilakukan pada setiap akhir semester, dengan menekankan pada aspek implementasi kurikulum. Evaluasi dilakukan untuk implementasi kurikulum pondok dan implementasi kurikulum sekolah/madrasah. Evaluasi implementasi kurikulum pondok difokuskan pada kemampuan santri membaca kitab, sarana pembelajaran, hubungan antar santri, kedisiplinan santri, dan kebiasaan santri pada saat liburan di rumah. Adapun evaluasi implementasi kurikulum sekolah/madrasah ditekankan pada: (1) rendahnya kemampuan dan motivasi peserta didik dalam pembelajaran, (2) terbatasnya kapasitas dan kemampuan guru untuk mengajar di kelas internasional, (3) pelaksanaan kelas olimpiade untuk MTs, MA, dan SMA Assalaam, (4) terbatasnya ketersediaan ruang terbuka yang rindang dan nyaman, dan (5) keterbatasan media dan sumber pembelajaran terutama untuk kelas reguler. Jika dilihat dari perspektif multikultural, kegiatan evaluasi kurikulum di PPMI Assalaam memuat nilai-nilai multikultural dan nilai anti multikultural sekaligus. Nilai demokrasi sangat mewarnai proses evaluasi baik dalam kurikulum pondok maupun kurikulum sekolah/madrasah. Hal ini teramati dari pendekatan musyawarah yang digunakan dalam evaluasi kurikulum, dalam arti semua peserta memperoleh kesempatan untuk menyampaikan usul, pendapat, saran, dan kritik. Adapun nilai perdamaian, toleransi, dan kebersamaan ditemukan dalam produk evaluasi kurikulum di PPMI Assalaam. Namun demikian, dalam kegiatan evaluasi kurikulum juga ditemukan adanya nilai-nilai anti multikultural yaitu masih terdapat konflik, hegemoni, dan dominasi yang terjadi antar santri dalam interaksi sosial mereka di lingkungan PPMI Assalaam. Konflik, hegemoni, dan

dominasi antar santri tersebut antara lain disebabkan oleh faktor senioritas, faktor kesalahpahaman dan kurang pengertian, serta faktor egoisme kelompok.

Keempat, model pengembangan kurikulum pesantren multikultural harus mempertimbangkan tiga hal: (1) perencanaan kurikulum pesantren multikultural, (2) implementasi kurikulum pesantren multikultural, dan (3) evaluasi kurikulum pesantren multikultural.



Gambar 1. Model Perencanaan Kurikulum Pesantren Multikultural Yang Ditawarkan Penulis

Model perencanaan kurikulum pesantren multikultural memerlukan proses yang multikultural. Model ini menyatakan bahwa perencanaan kurikulum pesantren dapat dianggap multikultural apabila proses perencanaannya melibatkan partisipasi banyak sumber daya manusia (Finch & Cruncilton, 1993: 46-48) sejak dari unsur yayasan, kyai, kepala sekolah/madrasah, komite sekolah/madrasah, pengguna lulusan sampai para guru secara demokratis, adil, dan terbuka. Dalam kaitan ini, pimpinan pesantren perlu membentuk tim atau kelompok kerja yang bertugas untuk menyusun rencana kurikulum pesantren multikultural. Gambar 1 menunjukkan bahwa tim yang dibentuk terdiri atas: (1) tim menyusun rencana strategis, (2) tim menyusun rencana program, dan (3) tim

penyusun rencana program pembelajaran. Setiap tim terdiri atas ketua, sekretaris, dan anggota.

Penyusunan rencana strategis merupakan tugas dari tim I. Tim ini beranggotakan ketua yayasan dan anggota, kepala sekolah/madrasah, ketua bidang kurikulum, komite sekolah, dan pengguna lulusan. Dasar untuk penyusunan rencana strategis tersebut adalah visi dan misi pesantren serta nilai keragaman, nilai perdamaian, nilai demokrasi, dan nilai keadilan dalam Islam. Adapun produk dari penyusunan rencana strategis adalah standar kompetensi, kerangka dasar dan struktur kurikulum pesantren yang bermuatan nilai-nilai multikultural.

Tim II bertugas untuk menyusun rencana program pendidikan. Tim ini beranggotakan kepala sekolah/madrasah, komite sekolah/madrasah dan beberapa guru yang dipilih berdasarkan keahlian disiplin ilmu yang dimiliki. Sumber yang harus dirujuk dalam penyusunan rencana program pendidikan adalah standar kompetensi, kerangka dasar dan struktur kurikulum pesantren. Adapun produk dari penyusunan rencana program pendidikan adalah: kompetensi dasar, beban belajar untuk setiap satuan pendidikan, dan kalender pendidikan pada setiap satuan pendidikan yang memuat nilai-nilai multikultural.

Sementara itu, tim III bertugas untuk menyusun rencana program pembelajaran. Tim ini beranggotakan semua guru yang ada di pesantren. Sumber yang harus dirujuk untuk penyusunan rencana program pembelajaran adalah standar kompetensi dan kompetensi dasar, beban belajar untuk setiap satuan pendidikan, dan kalender pendidikan. Adapun hasil dari penyusunan rencana program pembelajaran adalah silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran yang memuat: indikator pencapaian kompetensi, materi ajar, metode pembelajaran, sumber belajar, dan penilaian hasil belajar yang bermuatan nilai-nilai multikultural.

Selanjutnya, setiap ketua tim mempresentasikan hasil rumusannya dalam suatu forum diskusi perencanaan kurikulum yang dihadiri oleh semua tim dan semua guru yang ada di lingkungan pesantren. Forum ini berfungsi untuk membahas dan menyempurnakan produk perencanaan kurikulum, baik yang berupa rencana strategis, rencana program, maupun rencana program pembelajaran.

Model implementasi kurikulum pesantren multikultural mengharuskan materi ajar yang digunakan dalam proses pembelajaran memuat nilai-nilai multikultural, seperti nilai keragaman, nilai perdamaian, nilai demokrasi, dan nilai keadilan dalam Islam (Ibrāhīm, 1999: 44-45).

Dengan mempelajari nilai keragaman dalam Islam, peserta didik mampu memahami keberadaan orang lain yang berbeda etnik, budaya, bahasa, dan warna kulit, dan bahkan agamanya. Dengan mempelajari nilai perdamaian, peserta didik akan memiliki visi hidup yang harmonis, damai, dan kasih sayang di tengah-tengah kelompok masyarakat yang beragam. Sikap permusuhan, konflik, kekerasan, dan mau menang sendiri akan tertekan serendah-rendahnya. Sementara itu, dengan mempelajari nilai demokrasi dan keadilan, peserta didik akan memiliki sikap dan karakter yang demokratis dan adil terhadap orang lain. Sebaliknya, peserta didik akan menghindari sikap dan perilaku diskriminatif, hegemonik, dan dominatif.

Dalam aspek strategi pembelajaran, model implementasi kurikulum pesantren multikultural menghendaki strategi pembelajaran yang digunakan oleh guru dapat mengaktifkan para peserta didik berpartisipasi aktif dalam pembelajaran secara demokratis dan menyenangkan (SNP, Bab IV, Pasal 19, Ayat 1, 2005). Dalam hubungan ini, ada beberapa alternatif strategi pembelajaran yang ditawarkan, yaitu: (a) ceramah interaktif, (b) pembelajaran aktif, (c) pembelajaran kolaboratif, (d) diskusi kelompok, (e) bermain peran, dan (f) keteladanan (Garcia, 1982: 146). Keenam alternatif strategi pembelajaran ini ditawarkan dengan alasan karena keenam strategi pembelajaran tersebut sangat relevan untuk menyampaikan materi ajar yang sarat dengan nilai, seperti nilai keragaman, nilai perdamaian, nilai demokrasi, dan nilai keadilan.

Model pembelajaran yang ditawarkan di atas menuntut guru untuk menggunakan gaya pengajaran (*teaching style*) yang demokratis, terbuka, dan fleksibel. Gaya pengajaran ini ditawarkan sebagai model dengan alasan karena gaya pengajaran ini menempatkan setiap peserta didik dalam proses pembelajaran sebagai subyek yang memiliki status dan hak yang setara. Selain itu, gaya pengajaran ini juga memberikan perhatian kepada keragaman gaya belajar (*learning styles*) yang dimiliki para peserta didik. Dalam hubungan ini, guru yang demokratis akan memperhatikan gaya belajar peserta didik yang adil dan setara. Peserta didik yang cenderung kuat aspek pendengaran (*auditory*), atau kuat aspek penglihatan (*visual*), dan atau kuat aspek gerak dan keterlibatan (*kinesthetic*) memperoleh perhatian yang adil dan seimbang dari guru yang demokratis (DePorter & Hernacki, 1999: 112-18).

Dalam aspek evaluasi, model implementasi kurikulum pesantren multikultural merekomendasikan kepada guru untuk menggunakan tes prestasi (*achievement test*) dalam evaluasi pembelajaran. Untuk

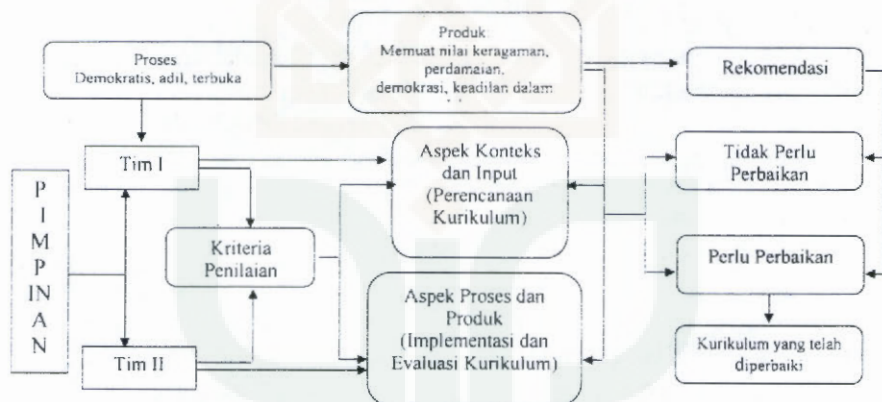
mengevaluasi aspek akademik, menurut Mercer (1989: 291) digunakan teknik studi kasus dan pemecahan masalah, sedangkan untuk mengevaluasi aspek non-akademik termasuk perilaku peserta didik digunakan teknik observasi dan kinerja (*performance techniques*). Dalam pelaksanaannya, teknik-teknik evaluasi di atas dapat dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan. Evaluasi yang bertahap dan berkelanjutan ditandai dengan evaluasi harian, evaluasi blok, evaluasi tengah semester, dan evaluasi akhir semester. Model evaluasi hasil pembelajaran ini ditawarkan dengan alasan karena model evaluasi ini sesuai dengan evaluasi yang distandarkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP, Bab X, Pasal 64, Ayat 1, 2005). Selain itu, model evaluasi ini memungkinkan terjadinya evaluasi yang fair dan adil. Dikatakan fair dan adil, karena untuk memutuskan kelulusan peserta didik tidak hanya ditentukan oleh evaluasi tengah dan akhir semester saja, melainkan juga ditentukan oleh evaluasi harian dan evaluasi blok. Dengan demikian, peserta didik akan diuntungkan oleh model evaluasi yang bertahap dan berkelanjutan ini.

Sifat lain dari model evaluasi hasil pembelajaran yang berwawasan multikultural adalah komprehensif. Evaluasi yang komprehensif ditandai dengan keragaman domain yang akan dievaluasi, yang terdiri atas: domain kognitif, afektif, dan psikomotorik. Untuk materi yang memuat nilai seperti nilai keragaman, nilai perdamaian, nilai demokrasi, dan nilai keadilan, model ini menuntut kepada guru untuk mengevaluasi ketiga domain tersebut. Selain karena sesuai dengan evaluasi yang distandarkan BSNP (Bab X, Pasal 64, Ayat 3, 2005) evaluasi yang komprehensif ini juga memberikan perhatian yang adil kepada ketiga domain yang dimiliki oleh setiap peserta didik.

Dari segi tekniknya, evaluasi hasil belajar yang ditawarkan adalah tes lisan, tes tertulis, portofolio, kinerja, dan penugasan. Pentingnya keragaman teknik evaluasi ini terletak pada kemungkinan semua domain yang ada pada diri peserta didik dapat dievaluasi dengan adil dan seimbang. Tes tertulis dapat digunakan untuk mengevaluasi domain kognitif peserta didik. Tes lisan dapat digunakan untuk mengevaluasi domain kognitif, afektif, dan psikomotorik peserta didik. Tes portofolio dapat digunakan untuk mengevaluasi domain kognitif dan afektif. Tes unjuk kerja dapat digunakan untuk mengevaluasi domain afektif dan psikomotorik peserta didik. Tes penugasan dapat digunakan untuk mengevaluasi ketiga domain yang dimiliki peserta didik. Dengan kata lain, keragaman teknik evaluasi yang digunakan guru untuk mengevaluasi hasil

pembelajaran peserta didik dapat menghasilkan output evaluasi yang fair dan adil.

Model evaluasi kurikulum pesantren multikultural menawarkan agar pimpinan pesantren membentuk tim dengan melibatkan semua SDM yang ada di pesantren dalam proses evaluasi kurikulum, sehingga tim yang dibentuk dapat bekerja secara efektif dan efisien. Gambar 2 menunjukkan bahwa model ini menawarkan dua tim yang perlu dibentuk: tim I berperan dalam mengevaluasi aspek konteks dan input, dua aspek yang terkait dengan evaluasi terhadap perencanaan kurikulum. Sementara itu, tim II berperan dalam mengevaluasi aspek proses dan produk, dua aspek yang terkait dengan evaluasi terhadap implementasi kurikulum. Setiap tim terdiri dari ketua, sekretaris, dan anggota. Jumlah anggota dapat disesuaikan dengan ketersediaan SDM yang ada di pesantren. Dalam prosesnya, kedua tim melakukan evaluasi kurikulum dengan cara diskusi secara demokratis dan terbuka dengan menghadirkan reviewer dari tenaga profesional.



Gambar 2. Model Evaluasi Kurikulum Pesantren Multikultural Yang Ditawarkan Penulis

Evaluasi terhadap aspek konteks dan input yang dilakukan oleh tim I menggunakan kriteria penilaian sebagai berikut: (1) alasan penentuan standar kompetensi, kompetensi dasar, dan indikatornya, beban belajar untuk setiap satuan pendidikan, dan kalender pendidikan; (2) muatan nilai multikultural yang terdapat dalam standar kompetensi, kompetensi dasar,

dan indikatornya, beban belajar untuk setiap satuan pendidikan, dan kalender pendidikan; (3) relevansi materi dan buku ajar, strategi pembelajaran, sumber belajar, dan penilaian hasil belajar dengan standar kompetensi; dan (4) muatan nilai multikultural dalam materi ajar, strategi pembelajaran, dan evaluasi hasil belajar (Finch & Cruncilton, 1993: 270-71).

Sebagai produk dari kerja tim I adalah kesimpulan bahwa aspek konteks dan input pesantren itu memuat nilai-nilai multikultural atau belum memuat nilai-nilai multikultural. Aspek konteks dari kurikulum pesantren dikatakan multikultural apabila dokumen standar kompetensi, kompetensi dasar, dan indikatornya, beban belajar untuk setiap satuan pendidikan, dan kalender pendidikannya memuat nilai keragaman, nilai perdamaian, nilai demokrasi, dan nilai keadilan. Sementara itu, aspek input dikatakan multikultural apabila dokumen buku ajar, strategi pembelajaran, dan evaluasi hasil belajar yang digunakan memuat nilai-nilai multikultural (Lynch, 1986: 86-87 dan Gollnick & Chinn, 1983: 3).

Jika dalam kesimpulan ditemukan bahwa dokumen yang dikaji menunjukkan adanya nilai-nilai multikultural, maka rekomendasinya adalah dokumen standar kompetensi, kompetensi dasar, dan indikatornya, beban belajar untuk setiap satuan pendidikan, dan kalender pendidikan, buku ajar, strategi pembelajaran, dan evaluasi hasil belajar tidak memerlukan perbaikan. Sebaliknya, jika kesimpulan yang diperoleh menunjukkan bahwa dokumen yang dikaji belum bermuatan nilai multikultural, maka rekomendasinya adalah dokumen standar kompetensi, kompetensi dasar, dan indikatornya, beban belajar untuk setiap satuan pendidikan, dan kalender pendidikan, buku ajar, strategi pembelajaran, dan evaluasi hasil belajar memerlukan perbaikan. Perbaikan yang diperlukan kemungkinannya sedikit (*small change*) dan atau banyak (*large change*).

Di pihak lain, evaluasi terhadap aspek proses dan produk yang dilakukan oleh tim II menggunakan kriteria penilaian sebagai berikut: (1) kualitas pelaksanaan pembelajaran; (2) kepuasan peserta didik terhadap proses pembelajaran; (3) standar tes yang digunakan; (4) muatan nilai-nilai multikultural dalam buku ajar, strategi pembelajaran, dan evaluasi hasil pembelajaran; (5) kinerja lulusan di masyarakat, (6) kepuasan lulusan terhadap posisinya di masyarakat, dan (7) kepuasan masyarakat terhadap kinerja lulusan (Oliva, 1992: 485-90).

Sebagai produk dari kerja tim II adalah kesimpulan bahwa aspek proses dan produk dari kurikulum pesantren dapat dikatakan multikultural

dan atau belum multikultural. Dikatakan multikultural, apabila proses implementasi kurikulum pesantren telah menyampaikan materi ajar yang bermuatan nilai-nilai multikultural; strategi pembelajaran yang digunakan guru sangat beragam dan dapat mengaktifkan peserta didik secara adil, setara, dan demokratis; serta tes yang digunakan dalam evaluasi hasil pembelajaran bersifat kontekstual dan komprehensif. Adapun produk kurikulum pesantren dapat dikatakan multikultural apabila lulusan yang dihasilkan berwawasan multikultural; dan masyarakat puas terhadap kinerja lulusan pesantren (Garcia, 1982: 146). Jika demikian halnya, maka keputusannya tidak memerlukan perbaikan terhadap aspek proses dan produk kurikulum pesantren.

Sebaliknya, dikatakan belum multikultural apabila proses implementasi kurikulum pesantren belum menyampaikan materi ajar yang bermuatan nilai-nilai multikultural; strategi pembelajaran yang digunakan guru belum beragam dan belum dapat mengaktifkan peserta didik secara adil, setara, dan demokratis; tes yang digunakan dalam evaluasi hasil pembelajaran belum bersifat kontekstual dan komprehensif. Adapun produk kurikulum pesantren belum dapat dikatakan multikultural apabila lulusan yang dihasilkan belum berwawasan multikultural; dan masyarakat belum puas terhadap kinerja lulusan pesantren. Jika demikian halnya, maka keputusannya adalah perlu ada perbaikan terhadap aspek proses dan produk kurikulum pesantren, baik sedikit (*small change*) maupun banyak (*large change*).

Dengan demikian, model evaluasi kurikulum pesantren multikultural ditentukan oleh proses dan produknya. Evaluasi kurikulum pesantren dapat dianggap multikultural apabila proses evaluasinya melibatkan partisipasi banyak pihak sejak dari unsur yayasan, kyai, kepala sekolah/madrasah, komite sekolah/madrasah, tenaga profesional sampai para guru secara demokratis, adil, dan terbuka. Selain itu, evaluasi kurikulum pesantren dapat dianggap multikultural apabila produknya berupa keputusan dan kesepakatan-kesepakatan tentang pentingnya perbaikan kurikulum dengan memperhatikan nilai keragaman, nilai perdamaian, nilai demokrasi, dan nilai keadilan yang terdapat dalam Alquran dan Hadis Rasulullah saw.

Rekomendasi

Menyadari urgensinya pengembangan kurikulum pesantren multikultural untuk mempromosikan nilai-nilai multikultural, disarankan

kepada pimpinan, bidang kurikulum, kepala sekolah/madrasah, dan para guru di lingkungan PPMI Assalaam Surakarta dua hal sebagai berikut:

1. Model pengembangan kurikulum pesantren multikultural disarankan bukan hanya didasarkan pada nilai-nilai multikultural dalam Alquran saja, tetapi juga pada nilai-nilai multikultural yang terdapat dalam Hadis Rasulullah saw.
2. Model kurikulum pesantren multikultural berusaha untuk menghindari nilai-nilai anti multikultural seperti nilai diskriminasi dan ketidakadilan. Kedua nilai anti multikultural tersebut ditemukan keberadaannya di PPMI Assalaam terutama terkait dengan kamar asrama eksklusif. Oleh karena itu disarankan agar para pimpinan, kepala sekolah/madrasah, bidang kurikulum, dan para guru di lingkungan PPMI Assalaam untuk mempertimbangkan kembali keberadaannya.
3. Penggunaan sumber belajar itu penting dalam implementasi kurikulum. Oleh karena itu kepada pimpinan dan kepala sekolah/madrasah di lingkungan PPMI Assalaam disarankan untuk tidak menerapkan kebijakan yang diskriminatif dan tidak adil antara kelas reguler dengan kelas akselerasi, kelas internasional, dan kelas olimpiade. Kebijakan tersebut terkait dengan penggunaan variasi sumber belajar yang dilakukan oleh para guru.
4. Oleh karena masih terdapat konflik yang terjadi antar santri dalam interaksi sosial di lingkungan PPMI Assalaam, maka disarankan kepada para pimpinan, kepala sekolah/madrasah, bidang kurikulum, dan para guru di lingkungan PPMI Assalaam untuk menghapuskannya dengan memasukkan nilai-nilai multikultural dalam seluruh program pendidikan.

MILIK PERPUSTAKAAN
UIN SUNAN KALIJAGA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama : Drs. Abdullah, M.Ag.
2. Tempat/Tgl. Lahir : Bojonegoro, 7 September 1965
3. Pangkat/Gol. : Pembina/IVa
4. Jabatan Fungsional Akademik : Lektor Kepala
5. Alamat Rumah : Perumahan Windan Baru, Rt 03/07, Gumpang, Kartasura, Sukoharjo, 57169
6. E-mail : Abdullah.Aly@gmail.com
7. Tilpon/HP : 0271-740835/08882987839
8. Alamat Kantor : FAI-UMS Jl. A. Yani Pabelan Kartasura Tromol Pos No. 1 Surakarta 57102
9. Tilpon Kantor : 0271-717417 psw. 145, 365, 191
10. Nama Ayah : H. Moh. Ali
11. Nama Ibu : Hj. Muti'ah
12. Nama Istri : Siti Nurrohrawati, S.Pd.
13. Nama Anak : 1. Faiz Adi Bestari
2. Ummaty Alfadila
3. Husnaya Madani
4. Altaf Muhammad Rumi

B. Riwayat Pendidikan

1. MI, Madrasah Ibtidaiyah : Bojonegoro, 1973-1979
"Nasy'atul Ulum"
2. MTs, Madrasah Tsanawiyah : Bojonegoro, 1979-1982
"At-Tanwir"

3. MA, Madrasah Aliyah "At-Tanwir" : Bojonegoro, 1982-1985
4. Fakultas Tarbiyah IAIN "Walisongo" : Semarang, 1985-1989
5. Program Magister Program Pascasarjana IAIN "Sunan Kalijaga" : Yogyakarta, 1997-2000
6. Program Doktor Program Pascasarjana IAIN "Sunan Kalijaga" : Yogyakarta, 2002-Sekarang

C. Riwayat Pekerjaan

1. Dosen pada Fakultas Agama Islam (FAI) : UMS Surakarta, 1990-sekarang
2. Ketua Pusat Studi Islam dan Kemuhammadiyahan (PSIK) : UMS Surakarta, 1993-1996
3. Direktur Pondok Hajjah Nuriyah Shabran : UMS Surakarta, 1993-1997
4. Ketua Lembaga Studi Islam (LSI) : UMS Surakarta, 1996-1997
5. Ketua Lembaga Studi Islam (LSI) : UMS Surakarta, 2000-2001
6. Sekretaris Program Magister Studi Islam (PMSI) : UMS Surakarta, 2001-2002
7. Penggiat pada Pusat Studi Budaya dan Perubahan Sosial (PSB-PS) : UMS Surakarta, 1998-sekarang
8. Trainer pada Center for Teaching and Learning (CTL) pada Fakultas Agama Islam : UMS Surakarta, 2003-sekarang
9. Staf Kajian dan Pengembangan pada Quality Assurance Center (QAC) : UMS Surakarta, 2005-sekarang

10. Pengelola Majalah Akademika : UMS Surakarta, 1992-1994 dan 200-2003
11. Pengelola Jurnal Shuhuf pada : UMS Surakarta, 2000-2004
Fakultas Agama Islam
12. Pengelola Profetika Jurnal : UMS Surakarta, 1998-2004
Studi Islam pada Program
Magister Studi Islam

D.Prestasi (Kursus, Kegiatan Ilmiah, dan Pengembangan Akademik)

1. Peserta pada Pelatihan Calon : Jakarta, 25-26 Maret 1997
Instruktur Pemetaan
Pendidikan Islam, Ditjen
Binbaga Islam Depag
2. Peserta pada Pelatihan : Jakarta, 24-29 Januari 2000
Metodologi Penelitian Sosial
Keagamaan, Dikti Depdiknas
3. Peserta pada *Training of* : Surakarta, 28-31 Juli 2003
Trainers on Higher Education
Course Design, FAI-UMS
4. Pemakalah pada "Seminar : Surakarta, Januari 2005
tentang Pendidikan
Multikultural di Indonesia",
Pusat Studi Budaya dan
Perubahan Sosial UMS
5. Peserta pada "Workshop : Surakarta, 23-25 Januari
Desain Serambi Kajian
Multikultural", Pusat Studi
Budaya dan Perubahan Sosial
UMS
6. Reviewer untuk "Proposal : SK Rektor No. 132/II/2005
Classroom Action Research
bagi Dosen UMS", Hibah
Teaching Grant TPSDP-Dikti
Diknas

7. Fasilitator pada “Serambi Kajian Multikultural (SKM)”, Pusat Studi Budaya dan Perubahan Sosial UMS : Surakarta, 22-24 Mei 2005
8. Peserta pada *IELTS Preparation Course at International Education Centre for 120 Hours* : Bandung, 10 Agustus-11 September 2005
9. Fasilitator pada “Workshop Desain Pembelajaran Partisipatif bagi Dosen Psikologi UMS” : Surakarta, 14-19 November 2005
10. Reviewer untuk “Proposal *Classroom Action Research* bagi Dosen UMS”, Hibah Teaching Grant TPSDP-Dikti Diknas : SK Rektor No. 113/I/2006
11. Fasilitator pada “Workshop Desain Pembelajaran Partisipatif bagi Perwira LANUD ADI SOEMARMO” : Surakarta, 6-9 Februari 2006
12. Reviewer untuk “Proposal Hibah Penelitian bagi Dosen Jurusan MIPA-PS Matematika UMS”, Program Hibah Kompetisi A-2 Batch III Tahun 2006 : Surakarta, 10 Maret 2006
13. Fasilitator pada “Workshop Desain Pembelajaran Partisipatif bagi Dosen di Lingkungan UMS” : Surakarta, 11-14 April 2006
14. Fasilitator pada “Workshop Desain Pembelajaran Partisipatif bagi Dosen Fakultas Ekonomi UMS” : Surakarta, 1-5 Mei 2006

15. Reviewer untuk Proposal Hibah Pengajaran bagi Dosen Fakultas Farmasi UMS, Program Hibah Kompetisi A-2 : Surakarta, 10 Mei 2006
16. Fasilitator pada "Workshop Desain Pembelajaran Partisipatif bagi Guru Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Karanganyar" : Karanganyar, 27-30 Juni 2006
17. Peserta pada *Staff NTU-NIE Enrichment Seminar on Teaching is More than Telling* : Singapore, 26-27 September 2006
18. Peserta pada *Short course on Quality Teaching and Learning in Higher Education at Centre of Educational Development Nanyang Technological University* : Singapore, 25 September-20 October 2006
19. Reviewer Proposal *Classroom Action Research* bagi Dosen Fakultas Geografi UMS : SK Rektor No. 052/II/2007
20. Peserta pada Workshop *Journal Based Teaching* pada Program Pascasarjana UMS : Surakarta, 16 April 2007
21. Peserta pada *Training of Trainers* Pengembangan dan Implementasi Kurikulum Berbasis Kompetensi pada Perguruan Tinggi, Dikti Depdiknas : Yogyakarta, 7-9 Juni 2007
22. Peserta pada *The 10th International Symposium on Contributions of Psychology to Peace: Social Justice, Cultural Diversity, and Peacebuilding* : Surakarta dan Yogyakarta, 18-23 Juni 2007

23. Fasilitator pada “Workshop Sistem Penjaminan Mutu di Perguruan Tinggi” diselenggarakan oleh Akademi Kesejahteraan Ibu Kartini Semarang : Semarang, 5-7 Nopember 2007
24. Fasilitator pada “Training for Teachers” diselenggarakan oleh SMPIT Nur Hidayah Surakarta : Surakarta, 10-13 Januari 2008
25. Fasilitator pada “Workshop Pembelajaran Berbasis *Student Centered Learning* (SCL)” bagi Guru SMP/SMA di Eks-Karesidenan Surakarta, diselenggarakan oleh Fakultas Psikologi UMS : Surakarta, 16-17 Januari 2008
26. Fasilitator pada “Workshop Penyusunan Silabus dan Rencana Mutu Pembelajaran” bagi para dosen di Fakultas Teknik UMS : Surakarta, 21 Juni 2008
27. Pemakalah “Nilai-nilai Perdamaian dalam Buku Ajar Pendidikan Agama Islam untuk SMP dan MTs di Surakarta”, disampaikan pada Semiloka Pendidikan Perdamaian Berbasis Islam oleh PSB-PS UMS : Surakarta, 25-26 Agustus 2008
28. Reviewer untuk “Draf Materi Pendidikan Perdamaian Berbasis Islam” untuk SMP dan MTs, PSB-PS UMS : Surakarta, 23 September 2008
29. Fasilitator pada “Pelatihan Desain Pembelajaran : Pekalongan, 17-19 November 2008

‘Sorogan’ (*Student Centered Learning*)” bagi para Dosen Universitas Pekalongan

30. Reviewer Proposal *Classroom Action Research* bagi Dosen Fakultas Geografi UMS : Surakarta, 1 Desember 2008

E. Pengalaman Organisasi

1. Sekretaris Walisongo English Club (WEC), IAIN Walisongo : Semarang, 1986-1989
2. Sekretaris Lembaga Pembina Keluarga Muslim (LPKM), Yayasan Bintang Kecil : Semarang, 1987-1989
3. Anggota Pengurus IMM Cabang : Semarang, 1987-1989
4. Anggota Pengurus Lembaga Sumber Daya Manusia dan Pendidikan Khusus, Pimpinan Pusat Muhammadiyah : Yogyakarta, 1995-2000
5. Anggota Pengurus Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah, Pimpinan Daerah Muhammadiyah Sukoharjo : Sukoharjo, 2000-2005 dan 2005-2010

F. Karya Ilmiah dalam bentuk Buku

1. Jihad di Bosnia: Umat yang Dibantai Bangsa yang Dibinasakan (terjemahan et.al.) : Yayasan al-Mukmin, Jakarta, 1992
2. Islam Bukan Agama Revolusi (terjemahan, et.al.) : CV Aneka, Solo, 1994
3. Buku Teks Studi Islam 1, 2, dan 3 (et.al) : Lembaga Studi Islam, Surakarta, 1996-2005
4. Buku Teks Studi : Lembaga Studi Islam,

- Kemuhammadiyah (et.al.) : Surakarta, 1996-2005
5. Etika Berpakaian dalam Islam (et.al.) : Lembaga Studi Islam, Surakarta, 1998-2006
 6. Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia (et.al.) : Pustaka Setia, Bandung, 1998
 7. Kapita Selekta Pendidikan Islam (et.al.) : Pustaka Setia, Bandung, 1999
 8. Muhammadiyah dalam Kritik (editor, et.al.) : Penerbit Muhammadiyah University Press, Surakarta, 1999
 9. Sinergi Agama dan Budaya Lokal (editor, et.al.) : Penerbit PSB-PS UMS, 2003

G. Karya Ilmiah dalam bentuk Artikel

1. Manusia dan Lingkungan Hidupnya dalam Perspektif Al-Qur'an : Akademika, Edisi Nomor 01 Tahun XI, 1993
2. Sebuah Dialog tentang Spiritualitas dan Pendidikan Islam : Akademika, Edisi Nomor 01 Tahun XII, 1994
3. Menidentifikasi Produk Ijtihad Muhammadiyah : Akademika, Edisi Nomor 03 Tahun XII, 1994
4. Menelaah Upah Pekerja: Antara Argumentasi Ekonomi dan Argumentasi Moralitas : Akademika, Edisi Nomor 01 Tahun XIV, 1996
5. Corak Tasawuf Tarekat Wahidiyah : Suhuf, Edisi No. 01 Tahun IX, 1997
6. Perkembangan Peradaban Islam di Mesir pada Masa Dinasti Fatimiyah: Telaah atas Pendidikan dan Kelembagaannya : Jurnal Wahana Akademika, Edisi 01-Th. 1-1998
7. Ilmu Takhrij Hadis: : Suhuf, Edisi No.02 Tahun

- Memperkenalkan Metodologi Penelitian Hadis : XI, 1999
8. Pendidikan Islam di Indonesia: Telaah atas Modernisasi Institut Agama Islam Negeri : Jurnal Wahana Akademika, Edisi 02-Th. 2-1999
 9. Rekonstruksi Sufisme Hassan Hanafi dan Refleksinya bagi Masa Depan Pendidikan Islam : Suhuf, Edisi No. 01 Tahun XII, 2000
 10. Strategi Dakwah pada Era Industrialisasi: Indoktrinasi atau Pemecahan Masalah? : Suhuf, Edisi No. 02 Tahun XII, 2000
 11. Pendidikan Formal dalam Islam: Kajian atas Madrasah Nizamiyah : Profetika, Vol. 2, No. 2 Juli 2000
 12. Wacana Pengembangan Pesantren di Indonesia : Profetika, Vol. 3, N0. 1 Januari 2002
 13. Fundamentalisme dan Politik Islam: Studi Kasus Sayid Qutb dan Ayatullah Khomeini : Profetika, Vol. 4, No. 2 Juli 2002
 14. Pengembangan Studi Islam di Indonesia pada Era Globalisasi: Kasus IAIN : Profetika, Vol. 5, No. 1 Januari 2003
 15. Menggagas Pendidikan Islam Multikultural : Jurnal Isyraqi, Vol. II Nomor 1 Tahun 2003
 16. Sinergi Agama dan Sains: Kasus Islam : Shuhuf, Edisi No. 02 Tahun XV, 2003
 17. Tradisi Lebaran dan Praktik Hidup Multikultural : Jurnal Kalimah Sawa', edisi 2006

H. Karya Ilmiah dalam bentuk Penelitian

1. Dimensi Pendidikan Islam dalam Surat Al-Qur'an Al-Asr, anggota peneliti, Lembaga Penelitian : UMS Surakarta, 1993

2. Peta Dakwah Kabupaten Sukoharjo, ketua peneliti, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat : UMS Surakarta, 1995
3. Dimensi Spiritualitas dalam Jasa Potong Rambut di Surakarta, ketua peneliti, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat : UMS Surakarta, 1997
4. Motivasi Belajar Mahasantri Pondok Hajjah Nuriyah Shabran, peneliti mandiri : Surakarta, 1998
5. Dimensi Multikulturalisme dalam Ceramah Keagamaan Islam di Surakarta, anggota peneliti, Ford Foundation : UMS Surakarta, 2005
6. Peranan Madrasah pada Era Otonomi Daerah di Surakarta, ketua peneliti, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat : UMS Surakarta, 2006
7. Tranformasi Pendidikan Islam Era Reformasi: Studi tentang Sekolah Dasar Islam dengan Sistem Integrasi, anggota peneliti, Ford Foundation : Surakarta, 2006
8. Model Pendidikan Perdamaian pada Pendidikan Anak Usia Dini di Surakarta, anggota peneliti, Program Hibah Bersaing Dikti Diknas : Surakarta, 2007
9. Pendidikan Perdamaian Berbasis Islam pada Sekolah Menengah Pertama di Surakarta, anggota peneliti, New Zealand Aid : Surakarta, 2008